

# Birokrasi Pendidikan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola dan Mutu Pendidikan

Rabiatul Adawiyah<sup>1\*</sup>, Muhammad Sirozi Sholihah<sup>2</sup>, Titin Sumanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 08, 2024

Accepted July 30, 2024

Available online August 25, 2024

### Kata Kunci:

Birokrasi, Pendidikan, Tata Kelola

### Keywords:

Bureaucracy, Education, Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Perkembangan birokrasi terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan. Birokrasi pendidikan di Indonesia memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak birokrasi pendidikan terhadap tata kelola dan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library riset untuk mengkaji birokrasi pendidikan di Indonesia dan implikasinya terhadap tata kelola dan mutu pendidikan. Analisis literatur dilakukan secara kualitatif dengan mencatat poin-poin penting dari setiap sumber. Hasil analisis kemudian disintesis secara tematik, mengidentifikasi tema-tema utama dan menghubungkan temuan dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks dan seringkali tidak efisien dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan pendidikan yang dinamis. Selain itu, struktur birokrasi yang kaku sering kali menyebabkan aliran informasi dan pengambilan keputusan yang lambat, yang berdampak negatif pada mutu pendidikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan tata kelola dan mutu pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan kapasitas manajerial, dan penguatan mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif di masa depan.

## ABSTRACT

Bureaucratic development occurs in various fields, including education. Educational bureaucracy in Indonesia plays a crucial role in regulating and managing the national education system. This study aims to analyze the impact of educational bureaucracy on the governance and quality of education in Indonesia. This study uses a library research method to examine educational bureaucracy in Indonesia and its implications for the governance and quality of education. Literature analysis was conducted qualitatively by recording important points from each source. The results of the analysis were then synthesized thematically, identifying key themes and connecting findings from various literatures. The results of the study indicate that complex and often inefficient bureaucracy can hinder innovation and responsiveness to dynamic educational needs. In addition, rigid bureaucratic structures often lead to slow information flow and decision-making, which negatively impacts the quality of education. These findings underscore the importance of bureaucratic reform to improve governance and quality of education in Indonesia, with a focus on simplifying bureaucratic processes, increasing managerial capacity, and strengthening accountability mechanisms. This study is expected to contribute to the development of more effective and responsive education policies in the future.

## 1. PENDAHULUAN

Eksistensi birokrasi secara institusional muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk negara modern. Sedangkan sebagai obyek kajian ilmu pengetahuan, kajian terhadap birokrasi mulai dilakukan pada waktu di sekitar revolusi Perancis pada abad ke-18 (1760-an). Secara literasi, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata "bureau" yang berarti meja tulis, di mana para pejabat (saat itu) bekerja di belakangnya kemudian memunculkan varian kata *bureaucratie* (bahasa perancis), *burocratie* (jerman), *burocrazia* (Italia) dan *bureaucracy* (Inggris) (Sujana, 2019; Syarifuddin et al., 2021; Utama, 2016). Istilah-istilah tersebut itulah yang kemudian dipakai untuk menunjukkan pengertian akan suatu organ/ institusi pelaksana kegiatan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [suharti0303202036@uinsu.ac.id](mailto:suharti0303202036@uinsu.ac.id) (Rabiatul Adawiyah)

pemerintahan dalam sebuah Negara, sebagaimana didefinisikan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa birokrasi adalah “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan keputusan kebijakan” (the bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions) (Angelita et al., 2022). Perkembangan birokrasi terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan. Tak dapat dipungkiri, bahwa setiap manusia membutuhkan pendidikan, bahkan di dalam kandungan, relatif sudah mulai mendengar, merasakan sentuhan, dan kepekaan perasaan (Elias, 2018; Yusrie et al., 2021). Tahap demi tahap pertumbuhan manusia sejak lahir beriringan pula dengan pendidikan yang diajarkan oleh orang tua dan anggota keluarganya. Oleh karena itu pendidikan sesungguhnya merupakan tanggung jawab dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (Mauliza et al., 2021; Usman, 2019).

Dengan demikian kebutuhan terhadap pendidikan, mendorong keluarga dan masyarakat, untuk meminta dan mendukung pemerintah dalam melakukan kebijakan publik, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Pendidikan Nasional, serta kementerian agama, untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan sekolah ataupun madrasah. Hal ini dilakukan sebagai katalisator dalam peningkatan mutu pendidikan dalam upaya mewujudkan tata kelola (management and Governance) yang baik, dan birokrasi pemerintah dalam bidang pendidikan (Geng & He, 2021; Oliveira & Hersperger, 2018; Suardi et al., 2023).

Untuk memudahkan pelayanan publik di bidang pendidikan, dibutuhkan dan dirumuskan pengelolaan organisasi berskala besar yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, birokrasi pendidikan dianggap sebagai bentuk yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut (Handini & Mustofa, 2022; Husain, 2015). Penerapan birokrasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Di era modern, membangun sistem birokrasi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya (Broderick et al., 2012; Syakur et al., 2020). Sistem birokrasi mencakup peraturan yang ketat, pengendalian perilaku masyarakat untuk memastikan ketertiban, kedisiplinan dalam antrean, dan distribusi sumber daya secara adil bagi seluruh warga Negara (Dunggio, 2020; Fitriyani et al., 2018; Utama, 2016). Peraturan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan pertumbuhan pendidikan yang berkualitas.

Implementasi birokrasi dalam pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan setiap kebijakan dan program pendidikan dilaksanakan dengan benar dan efektif. Selain itu, birokrasi memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, birokrasi pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Kim & Weiner, 2022; Shayya, 2018; Wray & Houghton, 2019). Oleh karena itu, sistem birokrasi yang terstruktur dengan baik menjadi kunci untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak birokrasi pendidikan terhadap tata kelola dan mutu pendidikan di Indonesia. Novelty dari penelitian ini mengembangkan dan memperbaiki sistem ini agar dapat menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman modern, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak mereka dalam bidang pendidikan

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode library riset untuk mengkaji birokrasi pendidikan di Indonesia dan implikasinya terhadap tata kelola dan mutu pendidikan. Library riset merupakan metode yang mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti (Istiqomah & Siswono, 2020). Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik dan merumuskan pertanyaan penelitian spesifik. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana birokrasi pendidikan di Indonesia mempengaruhi tata kelola dan mutu pendidikan. Selanjutnya, dilakukan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas, dengan mengutamakan sumber primer seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian.

Literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik, kualitas sumber, dan tahun publikasi, dengan fokus pada literatur terbaru. Literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar kualitas akademik dieliminasi. Analisis literatur dilakukan secara kualitatif dengan mencatat poin-poin penting dari setiap sumber. Hasil analisis kemudian disintesis secara tematik, mengidentifikasi tema-tema utama dan menghubungkan temuan dari berbagai literatur. Langkah ini melibatkan

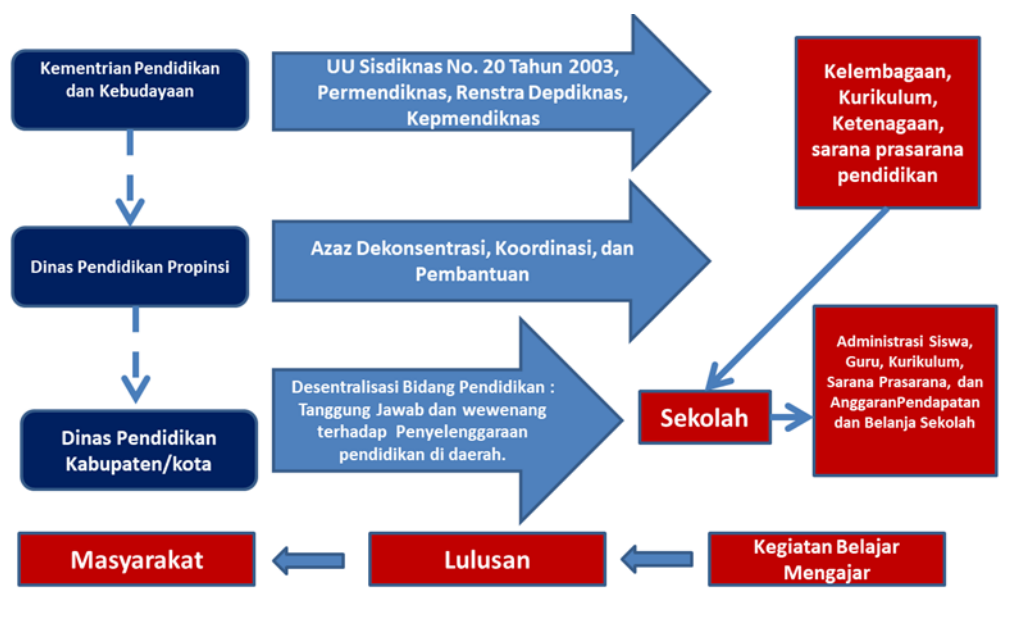
membandingkan dan mengkontraskan pandangan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.

Temuan dari sintesis literatur diinterpretasikan dalam konteks birokrasi pendidikan di Indonesia, mengaitkan dengan kerangka teori yang relevan. Hasil penelitian disusun dalam laporan yang mencakup tinjauan literatur, analisis tematik, dan interpretasi temuan, serta dilengkapi dengan referensi lengkap sesuai format sitasi yang berlaku. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui cross-referencing dan validasi temuan dengan literatur kredibel dan terkini. Revisi dan umpan balik dari ahli di bidang pendidikan juga digunakan untuk memastikan akurasi dan relevansi temuan. Metode ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang birokrasi pendidikan di Indonesia dan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Birokrasi Pendidikan dalam hal ini adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pelayanan pendidikan oleh aparatur pemerintah kepada warga negara. Biasanya birokrasi Pendidikan di Indonesia dimulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, bertugas dalam menyusun kurikulum yang berlaku, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan, menentukan alokasi anggaran, pengadaan sarana dan prasarana serta perawatannya, memperhatikan pelaksanaan proses belajar mengajar, mempersiapkan sistem evaluasi pendidikan, menjamin mutu pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana seperti skema di bawah ini, dalam konteks otonomi daerah birokrasi pendidikan nasional seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Konteks Otonomi Daerah

Sejalan dengan kesetaraan antara sekolah dan madrasah, dan mengacu kepada UU No.20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Manajemen di Madrasah pada lingkungan Kementerian Agama menjadi penting dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan hasil yang dicapainya. Untuk itu melalui direktorat pendidikan pada madrasah dari tingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten/kota memposisikan diri untuk meningkatkan tata kelola madrasah untuk menjadi lebih baik. Pendidikan di Madrasah pada kabupaten/kota merupakan sektornya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi sebagai unit organisasi induknya melalui kepala bidang Madrasah dan pendidikan Agama Islam (Kabid Mapenda). Kantor kementerian Agama Kabupaten/kota sebagai hirarki dari sebuah instansi vertikal. Gambar 2 menyajikan disain sistem organisasi bidang mapenda kanwil kementerian agama provinsi maupun dinas pendidikan kabupaten/kota.



Gambar 2. Desain Organisasi Bidang

**Indikator Tata Kelola yang Baik**

Transparansi (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan. Dalam hal ini keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi.

Partisipasi (*Participation*) adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan obsi-obsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengembalian kebijakan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin aspek partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum 12 yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir didalam penyusunan kebijakan.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan stakeholder. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola.

Koordinasi (*coordination*) adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sekolah, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan sekolah, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya tata kelola.

Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemandirian (*Independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa bentura kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 13 peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Tata kelola yang baik, (*Good Governance*) adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan sekolah, *Good Governance* lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat.

Namun, yang paling berpengaruh dalam tata kelola baik dalam struktur manajemen sekolah atau khususnya dalam penentuan pembelajaran di sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu melaksanakan *good governance* akan membawa sekolah ke arah yang lebih kompetitif dan dapat dipastikan sekolah yang dipimpinya akan lebih progresif ke arah yang lebih baik. Tujuan dan Prinsip Tata Kelola Pendidikan tujuan tata kelola pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan khususnya peningkatan mutu pembelajaran disamping akses pendidikan. Pendidikan yang bermutu sangat penting agar semua siswa dapat melaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya: siswa SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang diinginkan dan lulusan siswa SMK dapat dan mampu bekerja di industri atau menciptakan kerja sendiri. Prinsip tata kelola pendidikan adalah transparan dan mampu mengakomodasi keinginan masyarakat terutama harapan siswa untuk bisa hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.

### **Defenisi Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab “ artinya baik , dalam bahasa Inggris “*quality* artinya mutu, kualitas ”, Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran ), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”. Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah “Sebuah wasilah untuk mencapai kemuliaan dan menyerahkan jiwa untuk mendekat diri kepada Tuhan”. Berdasarkan Undang Undang Sisdiknas No. II Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut yaitu: kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas”. Menurut Mujamil mutu pendidikan adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”. Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM).

### **Implikasi Birokrasi Pendidikan Di Indonesia Terhadap Tata Kelola Dan Mutu Pendidikan**

Pemerintah sebagai pengelola birokrasi pendidikan di Indonesia tentu memberikan perhatian yang tinggi terhadap bidang pendidikan, sehingga berimplikasi terhadap berbagai kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor pendidikan atau praktik proses kependidikan, dapat dikemukakan secara ringkas bahwa terdapat delapan faktor yang sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, yaitu: kurikulum yang baik, guru yang berkompeten, keefektifan proses pembelajaran, penilaian, keterlibatan orang tua serta dukungan masyarakat, pendanaan yang memadai, disiplin yang kuat, dan keterikatan pada nilai-nilai unggul budaya masyarakatnya. Keunggulan dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan dengan pemanfaatan waktu di sekolah secara optimal melalui cara-cara berikut: mengajar siswa sejak dini dengan keterampilan belajar dan praktik, menerapkan kedisiplinan, memberikan pekerjaan rumah yang memadai, melakukan pengelolaan kelas, dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat.

Kemudian, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mengelola sumber daya manusia telah mengembangkan insentif atas kinerja yang dengan jelas menghubungkan kinerja dan tunjangan profesi/tunjangan kependidikan di samping gaji yang diterima bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru terhadap strategi peningkatan kinerja, yang diharapkan berimplikasi terhadap tata kelola dan mutu pendidikan. Demikian pula dengan para pejabat struktural di kantor pemerintah telah mendapatkan

tunjangan jabatan struktural dan tunjangan tambahan dari pengelolaan proyek yang dialokasikan bagi bidang/seksi mereka.

Dalam dokumen memorandum Madrasah Education Development Project dicantumkan bahwa Direktorat Pendidikan pada Madrasah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pendidikan pada Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Demikian pula dalam pembuatan kebijakankebijakan yang berhubungan dengan pengimplementasian Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah. Untuk itu suatu Panitia Pelaksana Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah dibentuk untuk memandu Unit Manajemen Proyek Pusat untuk menentukan arah kebijakan umumnya, koordinasi antara sektoral dan arah strategis. Para anggota panitia pelaksana proyek terdiri dari perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan Demikian diharapkan nantinya, suatu terobosan baru dalam peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Serta dampak yang dirasakan bagi berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia..

## Pembahasan

Dalam hal ini penulis mencoba mengambil pengertian birokrasi dalam arti yang positif. Birokrasi merupakan struktur yang di dalamnya terdapat hierarki, diferensiasi, dan kompetensi. Dalam hal ini hierarki berarti peringkat jabatan yang mengakibatkan perbedaan tingkat wewenang dan kekuasaan antar anggota dalam organisasi tersebut (Mubin & Roziqin, 2018; Wray & Houghton, 2019). Sedangkan diferensiasi adalah pembagian tugas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi kepada para personil birokrasi dalam sebuah kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan. Disisi lain kompetensi adalah birokrat yang menduduki suatu jabatan sebaiknya orang yang berkompenten sesuai jabatannya itu sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara professional (Shayya, 2018; Wray & Houghton, 2019).

Menurut penelitian sebelumnya birokrasi secara sederhana diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia (pelayanan) jasa kepada masyarakat (Mubin & Roziqin, 2018; Syakur et al., 2020). Dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta (*private*), maupun organisasi publik (*public*) termasuk organisasi pemerintahan di dalamnya terdapat organ-organ yang membentuk sebuah organisasi sehingga organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Dahliah, 2021; Ishaq et al., 2020).

Sedangkan menurut Sawir, menyatakan bahwa, Birokrasi adalah sistem administratif dengan aturan tertulis yang mengatur tugas serta tanggung jawab individu, melibatkan pembagian kerja yang jelas dan hierarki sebagai elemen kunci. Pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan besar, serta organisasi non profit biasanya memiliki birokrasi, karena prinsip impessoalitas menyatakan bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan standar objektif (Dahliah, 2021; Tambunan et al., 2021). Penelitian lain menyebutkan bahwa birokrasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi, terutama yang besar seperti pemerintah atau perusahaan. birokrasi memiliki aturan, prosedur, serta hirarki yang jelas (Zelmiyanti & Anita, 2015). Prinsip birokrasi termasuk rasionalitas, impersonalitas, hierarki yang terstruktur dengan baik, dan pembagian tugas khusus. Penelitian lain menyebutkan birokrasi membantu organisasi menjalankan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas nya dengan cara yang tertib, efisien, dan konsisten (Gaho et al., 2022). Meskipun memiliki manfaat, birokrasi kadang dianggap terlalu rumit dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

Meskipun disatu sisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh penelitian lain menyebutkan meskipun birokrasi kadang-kadang dianggap lamban dan terlalu formal, namun disisi yang lain tetap berkomitmen bahwa tujuan sistem birokrasi adalah untuk membuat struktur organisasi yang efektif, konsisten, dan terstruktur sehingga tugas dan tanggung jawab dapat didefinisikan dengan jelas. Metode ini telah menjadi dasar untuk manajemen organisasi modern dan penyelenggaraan pemerintah yang kompleks (Diantari & Wirathi, 2017; Rasdi & Kurniawan, 2018).

Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang efisien dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Implementasi kebijakan yang lebih transparan dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian menggarisbawahi perlunya reformasi birokrasi di sektor pendidikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan desentralisasi dan pengurangan birokrasi yang berlebihan. Langkah ini dapat memberikan fleksibilitas lebih besar

kepada institusi pendidikan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Penelitian ini mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan data dan sumber informasi yang akurat dan terbaru. Birokrasi pendidikan di Indonesia adalah bidang yang kompleks, dan mungkin terdapat kekurangan data yang dapat dipercaya untuk menganalisis semua aspek tata kelola dan mutu pendidikan secara komprehensif. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk semua konteks pendidikan di Indonesia. Variabilitas dalam kondisi sosial, ekonomi, dan geografis antar daerah di Indonesia dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mungkin lebih relevan untuk konteks tertentu dan memerlukan penyesuaian jika diterapkan di daerah lain. Penelitian ini sangat berguna bagi peningkatan dan perbaikan pada pendididn di Indonesia baik kepada kementerian maupun lembaga-lembaga swasta yang fokus pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

#### 4. SIMPULAN

Di zaman Modern, membangun sistem birokrasi adalah tugas dari pemerintah demi memberikan pelayanan berbagai kepentingan rakyatnya. Di dalam sistem ini terdapat, Peraturan (regulasi), pengendalian perilaku masyarakat untuk tertib, antri, dan menghormati pendistribusian bidang keperluan secara adil bagi seluruh warga negara. Birokrasi Pendidikan di Indonesia dimulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, bertugas dalam menyusun kurikulum yang berlaku, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan, menentukan alokasi anggaran, pengadaan sarana dan prasarana serta perawatannya, memperhatikan pelaksanaan proses belajar mengajar, mempersiapkan sistem evaluasi pendidikan, menjamin mutu pendidikan dan sebagainya.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- Angelita, M., Lukman, S., & Tahir, I. (2022). Inovasi Dan Efektivitas Pelayanan Melalui Mobile JKN Pada BPJS Kesehatan Di Jakarta Selatan. *Medium*, 9(2), 292-305. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).10073](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).10073).
- Broderick, A. A., Hawkins, G., Henze, S., Mirasol-Spath, C., Pollack-Berkovits, R., Clune, H. P., Skovera, E., & Steel, C. (2012). Teacher counternarratives: Transgressing and restorying disability in education. *International Journal of Inclusive Education*, 16(8), 825-842. <https://doi.org/10.1080/13603116.2010.526636>.
- Dahliah, D. (2021). The Role of Public Expenditure and Private Investment on Economic Growth in Makassar. *Point Of View Research Economic Development*, 2(1), 1-10. <http://repository.umi.ac.id/871/2/SIMILARITY%282%29.pdf>.
- Diantari, N. P., & Wirathi, I. G. A. P. (2017). Pengaruh Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(4), 472-498. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/28138/17765>.
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Dungingi Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.37606/publik.v7i1.114>.
- Elias, M. C. (2018). Analisis strategi bersaing pada perusahaan biro perjalanan di Malang. *Agora*, 6(2). <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/7745>.
- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 3(1). <https://doi.org/10.34128/mediteg.v3i1.35>.
- Gaho, R., Zagoto, S. F. L., & Telaumbanua, K. (2022). Peran Organisasi Karang Taruna dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pemuda Desa Hilinamozaua Kecamatan Onolalu. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 1-7. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Counseling/article/468>.
- Geng, M. M., & He, L. Y. (2021). Environmental regulation, environmental awareness and environmental governance satisfaction. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7), 1-17. <https://doi.org/10.3390/su13073960>.
- Handini, O., & Mustofa, M. (2022). Application of TPACK in 21st Century Learning. *International Journal of Community Service Learning*, 6(4), 530-537. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.54620>.
- Husain. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam Meningkatkan Mutu Pendiidkan Sekolah Dasar Di Kecamatan Lambay Kabupaten Kolaka

- Utara. *JKPP: Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 1(1), 88-102. <https://doi.org/10.36448/ejkpp.v1i1.589>.
- Ishaq, K., Azan, N., Zin, M., Rosdi, F., Abid, A., & Ijaz, M. (2020). The Impact of ICT on Students' Academic Performance in Public Private Sector Universities of Pakistan. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(3), 1117-1121. <https://doi.org/10.35940/ijitee.c8093.019320>.
- Istiqomah, N., & Siswono, T. Y. E. (2020). Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Metakognitif dan Pemecahan Masalah Matematika di Kelas XI SMA Negeri 1 Jombang. *MATHedunesa: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 9(2), 422-429. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v9n2.p422-429>.
- Kim, T., & Weiner, J. (2022). Negotiating Incomplete Autonomy: Portraits from Three School Principals. *Educational Administration Quarterly*, 58(3), 487-521. <https://doi.org/10.1177/0013161X221080374>.
- Mauliza, M., Nurhafidhah, N., & Hasby, H. (2021). Analisis Integrasi Nilai Karakter Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab dalam Buku Ajar Kimia SMA. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(2), 181-190. <https://doi.org/10.24815/jpsi.v9i2.18332>.
- Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity*, 8(8), 241-246. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v8.968>.
- Oliveira, E., & Hersperger, A. M. (2018). Governance arrangements, funding mechanisms and power configurations in current practices of strategic spatial plan implementation. *Land Use Policy*, 76, 623-633. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.042>.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2018). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2). <https://www.researchgate.net/>.
- Shayya, M. (2018). The impact of organisational culture on performance. *Journal for Global Business Advancement*, 11(3), 304-331. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2018.096306>.
- Suardi, S., Junaidi, J., Dewi, Y., & Arif, M. (2023). Governance of the Tsanawiyah Madrasah Limapuluh Kota Regency. *Journal on Education*, 5(3), 6277-6268. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1400>.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>.
- Syakur, A., Susilo, T. A. B., Wike, W., & Ahmadi, R. (2020). Sustainability of Communication, Organizational Culture, Cooperation, Trust and Leadership Style for Lecturer Commitments in Higher Education. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1325-1335. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V3I2.980>.
- Syarifuddin, Ilyas, J. B., & Sani, A. (2021). Pengaruh Persepsi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas di Kota Makassar. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2), 51-56. <https://doi.org/10.37531/biemr.v1i2.102>.
- Tambunan, H., Sinaga, B., & Widada, W. (2021). Analysis of teacher performance to build student interest and motivation towards mathematics achievement. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(1), 42-47. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20711>.
- Usman, U. (2019). Komunikasi Pendidikan Berbasis Blended Learning Dalam Membentuk Kemandirian Belajar. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1), 136-150. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5626>.
- Utama, F. A. (2016). Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia ( Perbandingan Konstitusi ). *Jurnal Civil Service*, 10(2), 17-27. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/186/176>.
- Wray, M., & Houghton, A. M. (2019). Implementing disability policy in teaching and learning contexts—shop floor constructivism or street-level bureaucracy? *Teaching in Higher Education*, 24(4), 510-526. <https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1491838>.
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(2), 126-143. <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.342>.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 8(10), 67-76. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/viewFile/38/68>.